

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DPRD**

---

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan TUPOKSI Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu kinerja para anggota Dewan serta menunjang pemerintahan dalam membangun Provinsi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, oleh karena itu dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2012-2017 serta tantangan yang semakin berat pada tahun 2017-2022, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

**1. Masalah yang bersifat internal**

- a. Belum terpenuhinya dan optimalnya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan dan kualitas penyelesaian tugas.
- b. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan

dan penyelesaian tugas-tugas internal dikarenakan tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.

- c. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, disebabkan adanya perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat bekerja secara maksimal.
- d. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti pelantihan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan bidang dan Tupoksinya.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia oleh aparatur di Sekretariat DPRD mengingat Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.
- f. Belum optimalnya pem-fungsi-an dan pemberdayaan tenaga ahli yang ada bagi anggota

DPRD sehingga menyebabkan lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insisiatif yang berasal dari Anggota DPRD.

## **2. Masalah yang bersifat eksternal**

- a. Lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah pembangunan yang memerlukan koordinasi. Hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Masih Kurangnya koordinasi antara Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perangkat daerah terkait dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Masih Kurangnya pengawasan dalam rangka pembinaan pelaksanaan program kerja perangkat daerah.

**Tabel 3.1**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN SEKRETARIAT DPRD**

MASALAH POKOK	FAKTOR	
	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3
1. Kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksi nya Belum optimal ;.	1. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal.	1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
2. Peraturan Daerah yang sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan belum optimal;	2. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	2. Perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Tenaga Ahli dan Staf ahli	3. Belum optimalnya sistem pelaporan dan	3. Semakin pesatnya

<p>bagi Anggota DPRD yang belum optimal</p>	<p>penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat bekerja secara maksimal.</p> <p>4. Lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insiatif yang berasal dari Anggota DPRD.</p>	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.</p> <p>4. Lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
---	--	--

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2012. Maka

Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ingin diwujudkan pada periode 2017-2022 adalah **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**. Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang

Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.

5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, ditempuh dengan melaksanakan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, yaitu :

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan Unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, merupakan salah satu perangkat daerah sebagai pelaksana :

Misi Kelima	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi
Tujuan	1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas 2. Meningkatkan Pembangunan Demokrasi
Program Prioritas Provinsi	1. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik 2. Pembangunan Berdemokrasi
Sasaran	1. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas 2. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
Indikator Sasaran	1. Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat 2. Skor aspek lembaga demokrasi
Strategi	1. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien 2. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
Arah Kebijakan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat 2. Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi
Program	1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 2. Program Peningkatan Pelayanan Kerumah Tanggaan Kehumasan Dan Protokoler Dewan 3. Program Pengembangan Risalah Rapat Dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan

### **3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Telaahan faktor-faktor penghambat dan pendorong merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penentuan isu-isu strategis



untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Telaahan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari perangkat daerah dapat membantu perangkat daerah itu sendiri dalam mengatasi permasalahan pelayanan yang ada. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi telaahan adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

**Tabel 3.3.1**  
**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DALAM**  
**PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
	Penghambat	Pendorong
1	2	3
1. Kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksi nya Belum optimalnya ;.	1. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal.	1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai

<p>2. Peraturan Daerah yang sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan belum optimalnya;</p>	<p>2. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>	<p>lembaga perwakilan.</p> <p>2. Perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
<p>3. Tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD yang belum optimalnya</p>	<p>3. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat bekerja secara maksimal.</p>	<p>3. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.</p>
	<p>4. Lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insisiatif yang</p>	<p>4. Lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi</p>

	berasal dari Anggota DPRD.	Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
--	----------------------------	---

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk itu, dalam menentukan isu-isu strategis di Sekretariat DPRD, berdasarkan pada faktor-faktor penghambat dan pendorong yang timbul sebagai permasalahan pada pelayanan perangkat daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Pemerintahan, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksi nya;.
2. Belum optimalnya Peraturan Daerah sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan;
3. Belum optimalnya tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD;